

## Diskusi dan Pemberian Pemahaman mengenai Keamanan Perbatasan Indonesia – Timor Leste Di Desa Silawan Kabupaten Belu

**Hildigardis Maria Imaculata Nahak<sup>1</sup>, Lenny Sofia Bire Manoe<sup>2</sup>, Christine Erika Meka<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Nusa Cendana

---

**Kata Kunci:**

Indonesia-Timor Leste;  
Pemberian Pemahaman;  
Pengamanan Perbatasan.

**Keywords:**

Border security;  
Classroom training;  
Indonesia-Timor Leste.

**Correspondensi Author**

Lenny Sofia Bire Manoe  
Prodi Sosiologi, FISIP  
Universitas Nusa Cendana  
[lenny.s.bire.manoe@staf.undana.ac.id](mailto:lenny.s.bire.manoe@staf.undana.ac.id)

**Abstract.** An involving the local community to contribute to border security and improve community welfare, we can carry out border security between Indonesia and Timor-Leste at the village level. This community service activity aims to provide a better understanding of border security efforts in Indonesia-Timor Leste and to enhance the role of the community in border security. This research employs a discussion approach and classroom training to facilitate understanding. Participants in this activity are the community of Silawan Village, security personnel, and a team from Universidade da Paz Timor Leste. The outcome of the activity is the achievement of a favorable understanding regarding border security and the creation of friendly cooperation between the communities of both countries.

**Abstrak Indonesia.** Pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste dapat dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat setempat dengan berkontribusi dalam pengamanan perbatasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya pengamanan perbatasan di Indonesia-Timor Leste dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengamanan perbatasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan diskusi dan pemberian pemahaman dengan menggunakan *classroom training*. Peserta dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Silawan, aparat keamanan dan tim dari Universidade da Paz Timor Leste. Hasil kegiatan adalah tercapainya pemahaman yang baik terkait pengamanan perbatasan dan terciptanya kerja sama yang baik antara masyarakat di kedua negara.

---

## Pendahuluan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah strategis yang berkaitan dengan keutuhan dan kedaulatan negara yang memerlukan pengelolaan khusus (Putra, 2024). Pengelolaan batas wilayah negara dan wilayah perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak berdaulat. Hal ini dilakukan dengan pendekatan bersama untuk kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan (Purwanto and Mangku, 2016). Berdasarkan PP. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan perbatasan merupakan Kawasan strategis nasional darisegi pertahanan dan keamanan, meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar) (BNPP-RI, 2015).

Hasil jajak pendapat rakyat Timor Leste telah memilih kemerdekaan sebagai Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) “Dalam Sidang MPR Oktober 1999, dikeluarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No.IV/1978 yang berisi tentang Integrasi Timor Leste. Sebagai konsekuensi logis Pemerintah Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas-batas negara untuk wilayah darat, laut dan udara dengan kesepakatan kedua negara. Dasar penetapan perbatasan merupakan Perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugis, dimana ketika masih dibawah Pemerintah Portugis wilayahnya terdiri dari: Oecussi, Timor-Timur, Pulau Kambing (Atauro) dan Pulau Yako. Kemerdekaan Timor-Leste dari kependudukan Indonesia menjadikannya sebagai perbatasan internasional” (Dirjen Strahan, 2007).

Wilayah perbatasan darat Negara Republik Indonesia (RI) dengan RDTL terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan laut berbatasan dengan Popinsi Maluku dan Papua, yang merupakan 20 pulau kecil terluar, yaitu Pulau Ararkula, Karaewira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag). Khusus Kawasan Perbatasan Laut RI dengan RDTL terdapat 5 (lima) pulau kecil terluar, yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu. Dalam penetapan dan penyelesaian perbatasan, Indonesia memiliki tiga wilayah yang memerlukan penetapan batas lokasi perbatasan laut dengan RDTL, yaitu Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor. Sejauh ini, penyelesaian batas laut antara Indonesia-RDTL masih harus menunggu penyelesaian perbatasan darat kedua negara”(BNPP-RI,2015).

Keamanan perbatasan oleh Indonesia diklasifikasikan "hard-border security regime" dimana keamanan perbatasan dilakukan secara ketat. Perbatasan dijaga ketat oleh angkatan bersenjata, sedangkan penyeberangan perbatasan dibatasi jumlahnya. Tidak hanya dijaga oleh petugas imigrasi, tetapi juga oleh polisi dan angkatan bersenjata. Negara-negara dengan rezim ini cenderung membatasi arus masuk pelintas dengan alasan keamanan nasional (Wuryandari, 2009). Dominasi negara dalam pengelolaan perbatasan diwujudkan dalam paradigma "*hard border*", adalah dimana perbatasan dikelola dengan mengutamakan keamanan dan kedaulatan melalui perwakilan militer (Sanak, 2011). Paradigma ini menjadikan negara sebagai actor yang bertanggungjawab atas "ruang" perbatasan. Paradigma tata kelola perbatasan mempengaruhi solusi pemerintah ketika terjadi masalah. Negara dianggap sebagai faktor penting dalam memerangi penyelundupan barang dan jasa ilegal dengan mengoptimalkan peran militer (Ullahand Kumpoh, 2018).

Wuryandari (2009) menjelaskan, "Kebalikan dari rezim ini adalah pengaturan perbatasan yang disebut *soft-border security regime*. Pada rezim ini, Negara tidak terlalu membatasi pelintas batas karena dianggap tidak mengancam keamanan nasional. Penjaga perbatasan tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasa nyang mengembangkan hidup berdampingan secara damai. Dua negara sahabat tersebut tidak merasa terancam." Garis batas dengan pengelolaan wilayah perbatasan memiliki arti dan fungsi strategis untuk menegakkan kesatuan kedaulatan wilayah dan dasar identitas kolektif suatu bangsa (Kolossof and Scott, 2013). Paradigma perbatasan telah bergeser dari pendekatan keamanan ke pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif. Proses kolaboratif sejalan dengan perubahan orientasi kebijakan perbatasan RI saat ini dari pendekatan kebijakan *hard-border security regime* "kependekatan kebijakan" *soft-border security regime*". (Ulfa, Fimmastuti and Nia Rahmah, 2018).

Daerah perbatasan di Indonesia umumnya jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan ciri yang menonjol dari wilayah perbatasan yang ditandai dengan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana dasar yang diperlukan (Hariyatie, 2015). Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang pada suatu saat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain ketimpangan sosial ekonomi, wilayah perbatasan Indonesia juga dicirikan karakteristik sosial

budaya masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kelompok masyarakat lain dari negara tetangga. Dalam batas tertentu, karakteristik tersebut dapat menjadi kendala bagi pengelolaan dan pengembangan kawasan di kawasan perbatasan. (Darmaputra,2009).

Kawasan perbatasan Indonesia dikelola melalui pendekatan keamanan yang menjadikan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai aktor utama. Hal ini berdasarkan UU No.34/2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa "TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan". Kini, mengelola perbatasan, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan tradisional berbasis pendekatan militer belaka. Pendekatan militer tetaplah penting, terutama dalam menangani masalah batas laut atau tindak pidana di perbatasan darat seperti pembalakan liar, penyelundupan, atau perdagangan manusia. Namun pendekatan militer saja tidak cukup karena masalah perbatasan fisik Indonesia dengan negara tetangga jauh lebih kompleks dari sekedar masalah militer. "Dengan demikian model pengelolaan perbatasan yang baik harus memperhatikan pemisahan secara tegas kewenangan pengelolaan bidang sosial ekonomi dengan bidang keamanan; Membangun profesionalisme TNI sebagai penjaga perbatasan; Membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah sebagai otoritas pengelolaan kawasan perbatasan. (Darmaputra,2009).

Sebuah kebijakan yang awalnya menekankan pendekatan keamanan, kini menuju pendekatan kemakmuran. "Melihat masalah di kawasan perbatasan ini, model pembangunan kawasan harus mengacu pada dua pendekatan, yaitu kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kesejahteraan tidaklah dapat dicapai tanpa dukungan keamanan. Keamanan dalam konsep ini tidak hanya mengacu pada keamanan negara saja, tetapi juga keamanan manusia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan dalam segala aspek tidak dapat tercapai tanpa kesejahteraan di bidang sosial ekonomi. Kedua pendekatan inilah yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan kawasan perbatasan"(Sarosa,2011).

Dari semua paparan tersebut, terdapat paradigma baru bahwa pengelolaan perbatasan bukan lagi hanya masalah keamanan. Karena itu terdapat pertanyaan dari negara tetangga Indonesia, Timor Leste khususnya dikalangan akademis, mengapa sistem pengawasan perbatasan RI-RDTL masih menggunakan "*hard-border security regime*". Untuk itu dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjelaskan peran TNI dalam penjagaan dan pengawasan wilayah perbatasan, khususnya kepada akademisi di Timor Leste.

## Metode dan Strategi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Dosen Prodi Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana. Dosen yang terlibat sebanyak 13 dan mahasiswa sebanyak 12 orang. Peserta kegiatan diskusi dan pendampingan adalah masyarakat Desa Silawan, aparat keamanan perbatasan dan tim dosen beserta mahasiswa dari Universidade da Paz Timor Leste.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah diskusi dan pemahaman tentang pengamanan di wilayah perbatasan di Desa Silawan, yaitu dengan menggunakan jenis *Classroom Training*. Jenis pelatihan ini merupakan metode yang paling populer, karena cukup efektif dan berguna untuk memberi pemahaman, konsep, dan prinsip-prinsip pada masyarakat yang jumlahnya yang cukup besar. Dalam pelatihan sejenis ini, setiap peserta dimungkinkan memperoleh banyak pengalaman di dalam ruangan dan mengetahui bagaimana proses diskusi dijalankan. Jenis *classroom training* ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra yang merupakan pihak keamanan di perbatasan yaitu TNI, Kepolisian dan Imigrasi. Tim kegiatan pengabdian melaksanakan *focus group discussion* dengan masyarakat Desa Silawan, pihak keamanan perbatasan dan tim dari Universidade da Paz sebagai perwakilan dari negara Timor Leste. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 September 2023.

Penerima manfaat atau target dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat perbatasan yang ada di perbatasan Motaain yaitu masyarakat Desa Silawan. Adapun diakhir pelaksanaan sosialisasi ini, akan dicapai sejumlah target dan luarannya sebagai berikut: (1) Peningkatan pemahaman masyarakat perbatasan yang di Desa Silawan yang berkaitan dengan keamanan di wilayah perbatasan tidak hanya keamanan secara fisik namun keamanan dapat dilihat secara non fisik yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. (2) Meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat di wilayah Kawasan perbatasan khususnya di Desa Silawan. (3) Orang tua memotivasi anak-anak untuk menempuh pendidikan guna memperbaiki taraf hidup yg lebih sejahtera.

Setelah kegiatan ini diharapkan banyak anak-anak perbatasan yg memiliki minat untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan guna memperdalam pemahaman akan pentingnya keamanan baik fisik maupun non fisik di wilayah perbatasan khususnya di Desa Silawan.

## **Program Unggulan**

Tersampainya aspirasi masyarakat wilayah perbatasan Motaain yang kesulitan melakukan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan terkait regulasi lintas batas yang di putuskan oleh kedua negara, pihak keamanan dari perwakilan dari Timor Leste berunding untuk mencapai kesepakatan yang *win win solution* bagi kedua negara. Diskusi dan pemahaman berlangsung dengan baik dan menghasilkan suatu pemahaman terkait regulasi lintas batas negara Indonesia-Timor Leste yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Pada tanggal 07 September 2023, kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Diskusi dan Pemberian Pemahaman Mengenai Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Desa Silawan Kabupaten Belu". Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait pentingnya pengamanan perbatasan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah.

### **a) Tinjauan umum tentang perbatasan Indonesia-Timor Leste**

Pada sesi pertama, kami memaparkan informasi mengenai sejarah dan pentingnya pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kami menjelaskan tentang kerja sama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan. Sesi pertama kegiatan pengabdian ini didedikasikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah dan urgensi pengamanan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi masyarakat Desa Silawan dalam menghargai serta terlibat aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan.

#### **1. Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste**

Dalam sesi ini, kami memaparkan sejarah pembentukan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Kami memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses politik, diplomasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan batas wilayah kedua negara ini. Kami juga membahas konteks historis dari masa lalu hingga saat ini yang memengaruhi dinamika hubungan kedua negara.

#### **2. Kerja Sama Bilateral Indonesia-Timor Leste**

Penting untuk dipahami bahwa Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan bilateral yang erat. Kami memberikan penekanan pada kerja sama antara kedua negara dalam hal keamanan, baik dalam konteks regional maupun internasional. Kami membahas upaya bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan perbatasan, serta membahas inisiatif bersama terkait pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan.



**Gambar 1.** Penandatanganan MOU Indonesia-Timor Leste

3. Implikasi Pentingnya Pengamanan Perbatasan

Sesi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pengamanan perbatasan merupakan aspek yang krusial bagi kedua negara. Kami menyoroti konsekuensi dari keamanan perbatasan yang rapuh, termasuk potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, perdagangan ilegal, dan potensi gangguan terhadap hubungan antarwarga di wilayah perbatasan. Dengan memahami implikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengapresiasi pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan di daerah ini.

4. Upaya Bersama untuk Menjaga Perdamaian

Kami juga memberikan gambaran mengenai berbagai inisiatif yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste beserta pihak terkait untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan. Termasuk di dalamnya adalah program-program pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama keamanan yang bertujuan memperkuat keberadaan positif di daerah perbatasan.

Dengan paparan rinci mengenai sejarah dan urgensi pengamanan perbatasan, diharapkan peserta dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

**b) Peran Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan**

Sesi kedua fokus pada peran aktif masyarakat dalam pengamanan perbatasan. Kami membahas strategi pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi ancaman yang dapat terjadi di daerah perbatasan. Kami juga memberikan pelatihan praktis tentang tindakan-tindakan darurat yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila menghadapi situasi yang memerlukan respons cepat. Pada sesi kedua, kami menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai pembahasan dalam sesi ini:

1. Pencegahan Ancaman di Daerah Perbatasan

Dalam upaya mencegah potensi ancaman di wilayah perbatasan, kami memaparkan strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat Desa Silawan. Beberapa poin penting yang kami diskusikan meliputi:

**Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Kami menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi ancaman yang mungkin terjadi di sekitar perbatasan. Edukasi tentang tanda-tanda awal dan praktik keamanan menjadi kunci dalam mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

**Pengawasan Aktivitas Mencurigakan:** Kami memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana mengenali dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa di sekitar wilayah perbatasan. Hal ini termasuk pengamatan terhadap orang asing atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aktivitas rutin masyarakat setempat.

**Kerjasama dengan Pihak Berwenang:** Kami menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan setempat. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai

cara melaporkan potensi ancaman kepada pihak berwenang untuk mendapatkan respons yang cepat dan tepat.

## 2. Deteksi Dini dan Respons Cepat

Kami memberikan pelatihan praktis tentang tindakan-tindakan darurat yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila menghadapi situasi yang memerlukan respons cepat. Poin-poin utama yang kami bahas termasuk:

**Komunikasi Darurat:** Kami memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan alat komunikasi darurat dan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi dalam situasi darurat.

**Evakuasi Aman:** Masyarakat diberikan panduan mengenai prosedur evakuasi yang aman dan tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan sementara.

**Pertolongan Pertama:** Kami memberikan pengetahuan dasar tentang tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan dalam situasi darurat, seperti penanganan luka ringan atau mengatasi kejadian medis mendesak.

Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pencegahan dan deteksi dini serta memberikan pelatihan praktis, diharapkan masyarakat Desa Silawan dapat menjadi bagian aktif dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan kerja sama dan kesiapan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di sekitar wilayah perbatasan.

## c) Kerja Sama Antar Instansi dalam Pengamanan Perbatasan

Dalam sesi ini, kami membahas pentingnya kerja sama antar instansi seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan perbatasan. Kami memberikan contoh kolaborasi yang berhasil di beberapa daerah perbatasan lainnya sebagai inspirasi bagi Desa Silawan. Pada sesi ini, kami mendalami pentingnya kerja sama antar instansi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai pembahasan dalam sesi ini:

### 1. Peran Aparat Keamanan

**Kerja Sama Operasional:** Kami menggarisbawahi betapa pentingnya kerja sama antara aparat keamanan dari berbagai instansi, seperti kepolisian, militer, dan petugas keamanan perbatasan. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan memonitor aktivitas di wilayah perbatasan.

**Pengkoordinasian Tindakan:** Kami membahas bagaimana instansi keamanan dapat saling berkoordinasi dan bertukar informasi untuk mendeteksi dan menanggapi potensi ancaman dengan lebih efektif.

### 2. Keterlibatan Pemerintah Daerah

**Pembentukan Kebijakan Lokal:** Kami menjelaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan terkait pengamanan perbatasan. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan terselenggaranya infrastruktur dan sumber daya yang mendukung upaya keamanan di wilayah perbatasan.

**Dukungan Logistik dan Sumber Daya:** Kami memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan dukungan logistik dan sumber daya lainnya kepada aparat keamanan untuk memperlancar operasi di wilayah perbatasan.

### 3. Partisipasi Aktif Masyarakat

**Pemberdayaan Masyarakat:** Kami membahas betapa pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengamanan perbatasan. Masyarakat memiliki peran aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan menjadi mata dan telinga bagi aparat keamanan.

**Program Pelatihan dan Kesadaran:** Kami memberikan contoh program pelatihan dan kampanye kesadaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat terkait upaya pengamanan perbatasan.

### 4. Contoh Kolaborasi Sukses di Daerah Lain

Studi Kasus: Kami memaparkan beberapa studi kasus kolaborasi sukses antarinstansi dan masyarakat di daerah perbatasan lainnya sebagai inspirasi bagi Desa Silawan. Kasus-kasus ini mencakup inisiatif yang berhasil meningkatkan tingkat keamanan dan stabilitas wilayah perbatasan. Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kerja sama antarinstansi, diharapkan peserta dapat memahami bahwa pengamanan perbatasan adalah upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

**d) Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab**

Setelah sesi presentasi, kami membuka forum diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam berbagi pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memperjelas informasi yang telah disampaikan. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai hal ini:

1. Fasilitasi Diskusi

Moderator: Seorang moderator akan memandu diskusi dengan memperkenalkan topik diskusi, memoderasi jalannya diskusi, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbicara.

Menyusun Agenda: Sebelum diskusi dimulai, kami menyusun agenda dengan topik-topik utama yang ingin dibahas. Agenda ini mencakup poin-poin penting yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

2. Pengajuan Pertanyaan

Kesempatan untuk Bertanya: Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang telah disampaikan. Pertanyaan dapat berkaitan dengan informasi yang disampaikan dalam presentasi atau hal-hal yang ingin dipahami lebih mendalam.

Klarifikasi Informasi: Moderator dan pembicara akan berusaha memberikan jawaban yang jelas dan memadai untuk setiap pertanyaan. Jika diperlukan, informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut akan diberikan.

3. Berbagi Pendapat dan Pengalaman

Memberikan Ruang untuk Pendapat: Peserta juga dapat berbagi pendapat, pengalaman, atau wawasan mereka terkait topik yang dibahas. Hal ini dapat membantu memperkaya diskusi dengan perspektif yang beragam.

Mengidentifikasi Tantangan dan Solusi: Diskusi juga dapat difokuskan pada mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi masyarakat Desa Silawan dalam menjaga keamanan perbatasan. Bersama-sama, peserta dapat mencari solusi yang dapat diimplementasikan secara lokal.

4. Membangun Pemahaman yang Lebih Baik

Mengklarifikasi Konsep Rumit: Diskusi interaktif membuka kesempatan bagi peserta untuk meminta penjelasan tambahan atau klarifikasi terhadap konsep atau informasi yang mungkin sulit dipahami selama presentasi.

Menggali Lebih Dalam: Diskusi juga memungkinkan untuk membahas topik-topik yang mungkin tidak sempat dibahas secara mendetail selama presentasi. Peserta dapat meminta informasi lebih lanjut atau studi kasus tambahan.

Dengan menyediakan forum diskusi interaktif dan tanya jawab, kami berharap membangun pemahaman yang lebih baik di antara peserta. Diskusi ini juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk terlibat secara aktif dalam pembahasan dan memberikan kontribusi berharga terhadap topik pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Desa Silawan.

Hildigardis Maria Imaculata Nahak, Lenny Sofia Bire Manoe, Christine Erika Meka.  
Diskusi dan Pemberian Pemahaman mengenai Keamanan Perbatasan Indonesia – Timor Leste Di Desa Silawan Kabupaten Belu



**Gambar 2.** *Diskusi interaktif antara masyarakat Desa Silawan, aparat keamanan, Tim Pengabdian dan Tim dari Universidade da Paz sebagai Perwakilan dari Timor Leste.*

#### e) Hambatan yang dihadapi saat kegiatan berlangsung

Selama kegiatan berlangsung, beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan teknologi atau infrastruktur komunikasi: Masalah terkait dengan koneksi internet atau sarana komunikasi lainnya dapat mempengaruhi komunikasi selama kegiatan. Selain itu kendala bahasa yang berbeda yang dihadapi mahasiswa dari kedua negara menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini namun dapat diatasi dengan baik oleh mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dan Universidade da Paz.

### Simpulan Dan Saran

Kegiatan ini diakhiri dengan kesimpulan yang menguatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan perbatasan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta, pemateri, dan pihak-pihak terkait yang telah mendukung suksesnya kegiatan ini. Semoga pemahaman yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Desa Silawan dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan. Setelah berbagai sesi presentasi dan diskusi interaktif, kami ingin menegaskan kembali pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Desa Silawan. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai kesimpulan dan penutup kegiatan ini:

#### 1. Pentingnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Kami menggarisbawahi bahwa keamanan perbatasan bukanlah tanggung jawab semata-mata aparat keamanan atau pihak-pihak terkait. Masyarakat Desa Silawan memiliki

peran kunci dalam memastikan wilayah perbatasan tetap aman dan terlindungi. Partisipasi aktif masyarakat meliputi pengamatan, pelaporan aktivitas mencurigakan, dan kesiapan untuk merespons situasi darurat. Dengan keterlibatan mereka, keamanan wilayah perbatasan dapat diperkuat secara signifikan.

2. Terima Kasih kepada Semua Pihak Terkait

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua peserta, pemateri, dan pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Dukungan dan partisipasi mereka telah menjadi pilar utama dalam menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada aparat keamanan, pemerintah daerah, dan semua individu yang telah berkomitmen untuk menjaga keamanan perbatasan. Kerja sama dari berbagai pihak sangat berarti dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil.

3. Harapan untuk Implementasi Pemahaman

Kami berharap bahwa pemahaman yang telah disampaikan dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Desa Silawan. Harapan kami adalah bahwa upaya bersama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan dapat terus dilakukan dengan penuh semangat dan dedikasi. Kami siap memberikan dukungan dan bimbingan tambahan bagi masyarakat dalam proses implementasi. Jika ada pertanyaan atau bantuan yang diperlukan, kami akan dengan senang hati memberikan yang terbaik.

Dengan mengakhiri kegiatan ini, kami berharap bahwa peserta akan membawa pulang pemahaman dan komitmen baru untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan perbatasan. Semoga Desa Silawan menjadi contoh yang gemilang dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Terima kasih atas partisipasi dan dedikasi semua pihak.

## Daftar Rujukan

- Bako, N., & Rani, F. (2022). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Journal of Governance and Local Politics*, 4(1), 45-63.
- Bere, Y. K., & Fathoni, A. (2022). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan: Studi Kasus Desa Silawan Kabupaten Belu." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-58.
- BNPP NTT, 2017. Kebijakan Pemerintah Propinsi NTT dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara RI-RDTL, di Segmen Bijael Sunan-Oben dan Noebesi-Citrana, Kupang:BNPP NTT
- BPP Setda TTU, 2017. Peran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Menyelesaikan Batas Antara Indonesia-Timor Leste di Segment Bijael Sunan Desa Manusasi, Kefamenanu:Bagian Pengelola Perbatasan Setda TTU
- , 2014. Data Kondisi Segmen Bermasalah dan Langkah Penanganan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamenanu: Bagian Pengelola Perbatasan Setda TTU
- Hadiwinata, Bob Sugeng, 2009. Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste, dalam Wuryandari, Ganewati (Ed.), 2009. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hariyatie, N. 2015. Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora UNLAM* 20(2): 19-29
- Kemenlu RI, BIG dan Topografi TNI Ad, 2013. Peta Annex B1 of Addendum No 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste tahun 2013, Jakarta: Kemenlu RI. BIG dan Topografi TNI AD

Hildigardis Maria Imaculata Nahak, Lenny Sofia Bire Manoe, Christine Erika Meka.  
Diskusi dan Pemberian Pemahaman mengenai Keamanan Perbatasan Indonesia – Timor Leste Di Desa Silawan Kabupaten Belu

- Laka, B., & Ola, S. S. (2023). "Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan di Desa Silawan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 12-27.
- Mella, W., & Bria, M. E. (2021). "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Perbatasan dalam Mencegah Aktivitas Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 13(1), 78-93
- Ndoen, F. H., & Suni, M. (2023). "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan dalam Menjaga Kedaulatan NKRI: Kajian di Desa Silawan." *Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 167-182.
- Putra, A. 2015. "Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (studi kasus perbatasan Nunukan-Tawau)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2(22): 308-326
- Putri, D. A., & Herman. (2021). "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 89-104.
- Riwanto, A., & Ginting, J. M. (2021). "Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus Pengamanan di Desa Silawan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 157-176.
- Sanak, Yohanis, 2012. *Human Security dan Politik Perbatasan*, Yogyakarta: UGM
- Seran, M., & Fernandez, R. (2021). "Diplomasi Perbatasan dalam Penyelesaian Konflik Indonesia-Timor Leste di Kawasan Perbatasan Darat." *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 278-293.
- Tari, E., & Bessie, J. (2022). "Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perbatasan berbasis Kearifan Lokal di Desa Silawan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 145-160.
- Wahyuni, S., & Prakoso, L. Y. (2020). "Sinergitas TNI-POLRI dalam Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi di Desa Silawan." *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 6(2), 233-252.
- Wuryandari & Ganewati, 2009. *Pengelolaan Keamanan Perbatasan: Kajian Teoritis*, dalam Wuryandari, Ganewati (Ed.), 2009. *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.